

Edisi Tahun 2019



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
2015-2019**

*Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung
Telp. 022-5202980 Fax. 022-5202871
Email : bbpk@bbpk.go.id - Web : www.bbpk.go.id*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah melakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pulp dan Kertas sesuai dengan perubahan Rencana Strategis di Lingkungan BPPI pada tahun 2019. Renstra disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Renstra BBPK disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, rancangan renstra teknokratik serta tugas pokok dan fungsi Balai berisi visi, misi, program, tujuan dan indikator kinerja, sasaran dan indikator sasaran, berisi target tahunan dan indikator kinerja unit (IKU).

Renstra BBPK 2015-2019 diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Balai Besar Pulp dan Kertas dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perindustrian.

Bandung, November 2019
Kepala,

Saiful Bahri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	6
1.2.1 Potensi.....	6
1.2.2 Permasalahan.....	9
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	11
2.1 Visi.....	11
2.2 Misi	11
2.3 Tujuan dan Indikator Tujuan	12
2.4 Sasaran Strategis	13
2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	23
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri	23
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar Pulp dan Kertas	30
3.3 Kerangka Kelembagaan	34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	37
4.1 Target Kinerja Tahun 2019.....	37
4.2 Kerangka Pendanaan	38
BAB V Penutup	39
LAMPIRAN	41

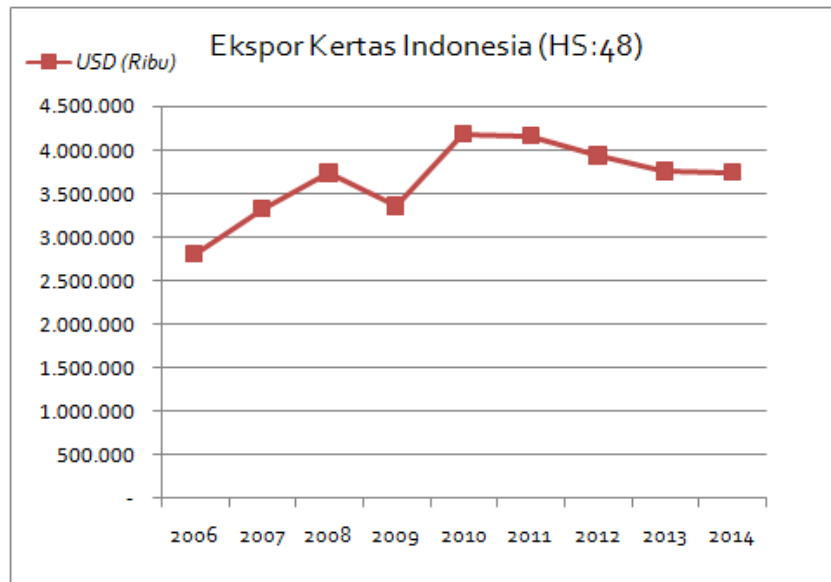
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Indonesia memiliki posisi yang strategis pada industri pulp dan kertas dunia. Indonesia menduduki peringkat ke-9 dunia untuk produksi pulp dan peringkat ke-6 untuk produksi kertas. Sementara di Asia, produksi pulp dan kertas Indonesia menduduki peringkat ke-3. Pada tahun 2015, kapasitas terpasang pulp nasional adalah 7,93 juta ton per tahun, sedangkan kertas sebesar 12,98 juta ton per tahun. Sedangkan untuk realisasi produksi pulp mencapai 6,4 juta ton/tahun dan kertas mencapai 10,4 juta ton/tahun.

Industri pulp dan kertas Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Industri pulp dan kertas merupakan salah satu industri andalan penghasil devisa negara dari sektor non migas. Ekspor pulp Indonesia mencapai 3,50 juta ton dengan nilai USD 1,72 milyar, sedangkan ekspor kertas mencapai 4,35 juta ton senilai USD 3,75 milyar. Sementara itu impor pulp dan kertas Indonesia adalah sebesar 1,62 juta ton pulp dengan nilai USD 1,27 milyar dan 0,72 juta ton kertas senilai USD 1,36 milyar. Selain itu, industri pulp dan kertas merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sebanyak 681.000 orang, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran.

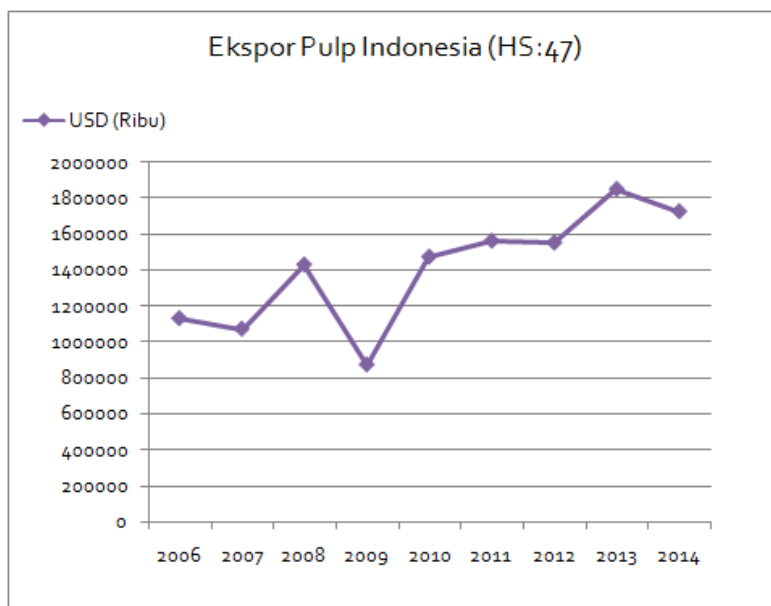


Gambar 1 : Ekspor Kertas Indonesia Tahun 2006-2014

Sumber : Trademap.org, diolah

Pada Gambar.1 dapat dilihat bahwa kinerja ekspor kertas Indonesia (Kode HS 42 : Paper and paperboard, articles of pulp, paper and board) memiliki tren naik selama kurun waktu tahun 2006-2014. Hal ini menjadi indikasi bahwa industri kertas nasional mampu bersaing di pasar dunia.

Sama halnya dengan kinerja ekspor kertas, kinerja ekspor pulp dengan kode HS 47 (Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc) juga memiliki tren yang naik. Walau sempat terjadi penurunan ekspor pulp pada tahun 2009 akibat krisis ekonomi dunia, namun secara keseluruhan ekspor pulp Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2006-2014 seperti pada Gambar. 2 di bawah ini.



Gambar 2 : Ekspor Pulp Indonesia Tahun 2006-2014

Sumber : Trademap.org, diolah

Letak geografis Indonesia sangat ideal untuk industri pulp dan kertas, yaitu berada di daerah khatulistiwa dengan curah hujan dan sinar matahari yang cukup, serta areal hutan yang luas, merupakan salah satu wilayah di dunia yang memiliki sumber bahan baku serat terbarukan (renewable fibre resources) yang signifikan. Hal ini menjadi keunggulan komparatif bagi pengembangan industri pengolahan kayu, termasuk industri pulp dan kertas.

Industri pulp dan kertas Indonesia memiliki prospek yang bagus karena potensi bahan bakunya yang cukup besar serta meningkatnya konsumsi kertas dunia. Pertumbuhan konsumsi kertas per tahun dunia mencapai 2,1 %, negara berkembang 4,1% dan negara maju 0,5%. Sedangkan kebutuhan tenaga kerja kurang lebih sebanyak 400 orang per tahun. Oleh karena itu Industri Pulp dan Kertas mejadi salah satu industri prioritas dalam program pemerintah untuk percepatan pembangunan industri di Indonesia.

Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan daya saing industri pulp dan kertas nasional. BBPK menjadi

mitra strategis industri pulp dan kertas dalam penyediaan jasa riset di bidang pulp, kertas dan lingkungan, memberikan layanan pengujian serta pelatihan SDM bidang pulp dan kertas. Peran BBPK diwujudkan melalui pelaksanaan pelayanan jasa teknis kepada industri, diantaranya :

- a. Kegiatan pelayanan riset untuk memberikan solusi terhadap permasalahan di industri seperti pemanfaatan bahan baku pulp kertas, daur ulang kertas bekas, maupun pengolahan limbah industri.
- b. Memperkuat daya saing industri dengan menyediakan pelayanan jasa sertifikasi produk dan sertifikasi ekolabel bagi komoditi pulp dan kertas
- c. Memberikan layanan pengujian (air, kertas dan udara) dan kalibrasi peralatan.
- d. Peningkatan capacity building SDM industri dengan layanan jasa pelatihan.
- e. Memberikan jasa konsultasi dalam rangka pengendalian mutu produk, proses, dan lingkungan, serta pemecahan masalah di industri
- f. Layanan perumusan standar.

Jenis layanan jasa teknis dan industri yang menggunakannya dapat dilihat pada Tabel. 1 di bawah ini.

Tabel 1 : Industri Pengguna Layanan Jasa BBPK

No.	Jenis Layanan Jasa	Industri Pengguna
1	Penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Industri pulp dan kertas - Industri/pemasok aditif pulp dan kertas - Pemerintah - Lembaga litbang pemerintah dan luar negeri - Perguruan tinggi dan asosiasi - Industri terkait lainnya
2	Pelatihan teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Industri pulp dan kertas - Industri konverter - Industri/pemasok aditif pulp dan kertas - Pemerintah, Lembaga litbang pemerintah - Perguruan tinggi & Industri terkait lainnya

No.	Jenis Layanan Jasa	Industri Pengguna
3	Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> - Industri pulp dan kertas - Industri konverter - Industri/pemasok aditif pulp dan kertas - Pemerintah, Lembaga litbang pemerintah - Perguruan tinggi dan Industri terkait lainnya
4	Standardisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Industri pulp dan kertas - Industri konverter - Pemerintah dan Lembaga litbang pemerintah - Industri terkait lainnya
5	Konsultansi	<ul style="list-style-type: none"> - Industri pulp dan kertas - Industri konverter - Industri/pemasok aditif pulp dan kertas - Pemerintah - Industri terkait lainnya
6	Kalibrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Industri pulp dan kertas - Industri konverter - Industri/pemasok aditif pulp dan kertas - Pemerintah dan Lembaga litbang pemerintah - Perguruan tinggi dan Industri terkait lainnya
7	Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Industri pulp dan kertas - Industri konverter - Industri terkait lainnya

A. Perkembangan Kinerja Keuangan BBPK

Sumber dana BBPK bersumber dari Dana APBN baik Rupiah Murni maupun PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dana Rupiah Murni merupakan sumber dana bagi BBPK yang berasal dari Pemerintah Pusat. Sedangkan PNBPN merupakan sumber dana yang diperoleh dari hasil Pelayanan Jasa yang dilaksanakan oleh BBPK kepada masyarakat pengguna jasa dengan tarif sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Kinerja keuangan BBPK tahun 2010 – 2014 disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 : Realisasi Anggaran BBPK Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		(Rp.)	(%)
2010	12.420.388.000	12.130.992.960	97,67%
2011	14.968.112.000	14.766.042.488	98,65%
2012	15.708.307.000	15.028.137.307	95,67%
2013	18.823.289.000	17.938.594.417	95,30%
2014	19.719.281.000	17.960.321.135	91,08%

Sedangkan pendapatan BBPK yang diperoleh dari pelayanan jasa tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel.3 berikut ini.

Tabel 3 : Realisasi PNBPK BBPK Tahun 2010-2014

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi	
		(Rp.)	(%)
2010	2.099.870.000	2.278.358.950	108,50%
2011	2.057.285.000	2.291.404.033	111,38%
2012	2.524.899.000	2.360.023.095	93,47%
2013	2.928.710.000	2.883.314.995	98,45%
2014	3.221.580.000	2.376.237.408	73,76%

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

1.2.1.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Pegawai BBPK pada Tahun 2015 sebanyak 109 orang dengan komposisi 72 orang pegawai laki-laki dan 37 pegawai perempuan. Dengan latar belakang pendidikan yang beragam yang didominasi oleh pegawai dengan pendidikan Sarjana (S1).

Jumlah pegawai BBPK berdasarkan latar belakang pendidikan, disajikan pada Tabel.4 di bawah ini.

Tabel 4 : Pegawai BBPK Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	2
2	S2	19
3	S1	46
4	D3	4
5	SLTA	34
6	SLTP	2
7	SD	2
Total		109 Orang

1.2.1.2 Potensi Infrastruktur

BBPK memiliki sarana laboratorium riset pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan, sarana laboratorium pengujian dan kalibrasi, serta sarana penunjang seperti sarana perpustakaan, sarana teknologi informasi, serta sarana utilitas.

Laboratorium di BBPK terdiri dari beberapa laboratorium yaitu:

1. Lab riset pulp
 - a. lab bahan baku
 - b. lab morfologi serat
 - c. lab analisis komponen kimia
 - d. lab pemasakan dan pemutihan pulp
 - e. lab komposisi kimia dan lindi hitam
 - f. lab pulp plant
 - g. lab pilot plant
2. Lab riset kertas

- a. lab stock preparation
- 3. Lab riset lingkungan
 - a. lab pengolahan air limbah
 - b. lab mikrobiologi
 - c. lab toksikologi
- 4. Lab derivat selulosa
- 5. Lab Pengujian
 - a. Lab Air
 - b. Lab Kertas
 - c. Lab Udara
 - d. Lab Kalibrasi
- 6. Lab lainnya
 - a. lab uji AOX
 - b. Ruang simpan bahan kimia

1.2.1.3 Potensi Kelembagaan

Potensi kelembagaan yang dimiliki oleh BBPK yaitu bahwa BBPK telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 untuk ruang lingkup (1) Pelayanan Jasa Riset (2) Pelayanan Jasa Pelatihan dan Alih Teknologi (3) Pelayanan Jasa Konsultansi di bidang Industri Pulp, Kertas, dan Lingkungan. SNI ISO 17025:2005 untuk sistem mutu di laboratorium uji dan kalibrasi serta diterapkannya sistem pranata litbang KNAPPP untuk menjamin kualitas pelaksanaan litbang di BBPK. Selain itu, BBPK juga memiliki Lembaga Sertifikasi Ekolabel sesuai Pedoman KAN 801:2004 dan Lembaga Sertifikasi Produk sesuai Pedoman SNI ISO/IEC 17065:2012.

BBPK telah mengintegrasikan dua sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dan ISO 17025:2005 yang telah berlangsung secara terpisah serta mengakomodir versi terbaru yaitu ISO 9001:2008. Tujuannya adalah untuk efisiensi implementasi sistem, merampingkan struktur organisasi, dan

memudahkan proses monitoring dan koordinasi. Hal ini sejalan dengan penjelasan pada persyaratan standar internasional sistem manajemen laboratorium ISO 17025 : 2005. Persyaratan tersebut mengharuskan sebuah organisasi atau lembaga untuk menerapkan prinsip-prinsip sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di dalam mengimplementasikan sistem manajemen laboratorium ISO 17025:2005.

Dalam rangka untuk dapat ikut berperan dalam kegiatan litbang nasional maupun internasional, terutama pengakuan kompetensi litbang serta mendukung industri pulp dan kertas pada umumnya untuk meningkatkan kualitas melalui litbang iptek, Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) mengajukan akreditasi pranata litbang ke KNAPPP. Pranata Penelitian dan Pengembangan adalah suatu unit kerja yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dalam bidang tertentu atau yang spesifik, baik dalam bidang ilmu teknik, ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. KNAPPP adalah Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan yang dibentuk oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) melalui Keputusan Menteri nomor 91/M/Kep/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001, yang mempunyai tugas membantu Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam pengawasan mutu dan efisiensi seluruh pranata litbang yang ada di Indonesia selain itu untuk mendapatkan gambaran kemampuan nasional dalam melakukan kegiatan litbang di Indonesia.

1.2.2 Permasalahan

Balai Besar Pulp dan Kertas memiliki peranan yang sangat penting khususnya pada industri Pulp dan Kertas. Namun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terhambat karena bencana banjir yang terjadi di daerah sekitar kantor BBPK. BBPK berbatasan langsung dengan Sungai Citarum yang menjadi sumber utama penyebab banjir di daerah Bandung bagian selatan. BBPK berada pada daerah rawan banjir karena tepat berada di tepi Sungai Citarum.

Daerah di sekitar Sungai Citarum (Kecamatan Dayeuhkolot dan sekitarnya) termasuk area rawan bencana banjir.

Banjir mulai melanda BBPK sejak tahun 1986. Dari tahun ke tahun, luapan Sungai Citarum semakin membesar yang mengakibatkan banjir parah di area kantor. BBPK mengalami banjir dari mulai genangan yang kecil dengan ketinggian kurang dari setengah meter hingga banjir besar yang merendam area kantor dengan ketinggian mencapai 2 meter.

Walaupun upaya penanggulangan telah dilakukan, dari tahun ke tahun saat terjadi banjir, ketinggian air di areal kantor terus meningkat dan kerugian akibat kerusakan yang dialami semakin besar. Kerugian materiil berupa rusak/hilangnya aset negara mencapai miliaran rupiah selama banjir di BBPK. Di lain pihak, banjir yang melanda BBPK menurunkan reputasi BBPK di hadapan pelanggan karena terganggunya pelayanan jasa teknis dan hal ini berakibat menurunkan jumlah pelanggan dan mengurangi daya saing BBPK dalam memberikan pelayanan kepada dunia industri.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya alokasi dana yang diberikan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BBPK. Alokasi dana BBPK bersumber dari Dana APBN baik Rupiah Murni maupun PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dana Rupiah Murni merupakan sumber dana bagi BBPK yang berasal dari Pemerintah Pusat. Sedangkan PNBPN merupakan sumber dana yang diperoleh dari hasil Pelayanan Jasa yang dilaksanakan oleh BBPK kepada masyarakat pengguna jasa dengan tarif sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Proporsi dana PNBPN masih jauh lebih kecil daripada dana Rupiah Murni. Salah satu penyebabnya karena pendapatan yang masih rendah sebagai akibat belum adanya SNI wajib pada komoditi pulp dan kertas.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi

Visi Kementerian Perindustrian :

Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan

Visi pembangunan Industri Nasional pada tahun 2035 adalah menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global;
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Visi Balai Besar Pulp dan Kertas :

Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa^{*)}, dan lingkungan

^{*)} *Dissolving pulp, CMC, Nitro Cellulose, Acetic Cellulose, Viscose Rayon dll*

2.2 Misi

Misi Kementerian Perindustrian :

Untuk mewujudkan visi Kementerian Perindustrian, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut :

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Misi Balai Besar Pulp dan Kertas :

1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan.
2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan.

2.3 Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan ditetapkan untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Pembangunan Industri Kementerian Perindustrian 2015-2019 :

Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing.

Tujuan Balai Besar Pulp dan Kertas 2015-2019 :

Meningkatkan peran balai dalam mendukung industri pulp dan kertas nasional yang tangguh dan berdaya saing

Ukuran pencapaian tujuan diukur dengan indikator kinerja tujuan. Adapun indikator kinerja tujuan BBPK tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

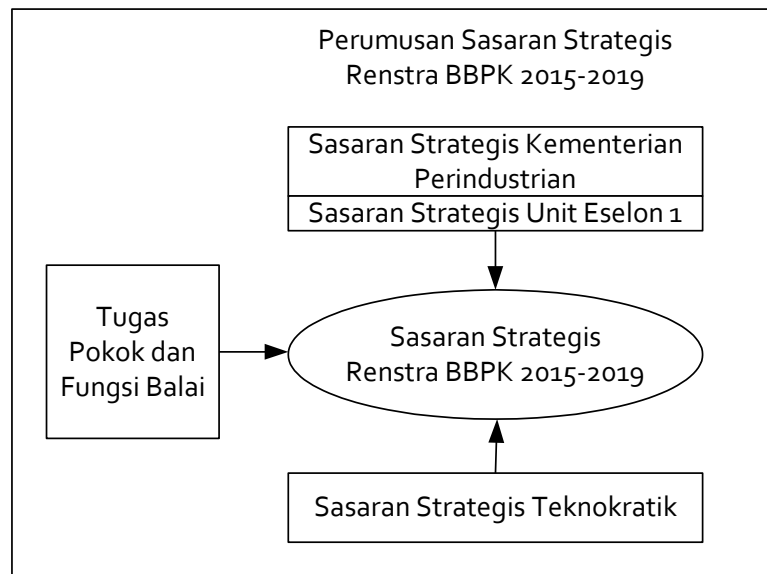
1. Hasil litbang yang diimplementasikan minimal satu setiap tahun
2. Peningkatan Pengguna layanan jasa balai minimal 2% setiap tahun

Indikator kinerja tujuan ini mencerminkan dua peran utama BBPK dalam mendukung dunia industri, yaitu hasil-hasil litbang yang diimplementasikan di industri dan peningkatan pengguna layanan jasa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BBPK yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 42 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPK yaitu melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertas.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Untuk mengukur pencapaian tujuan selama lima tahun, dijelaskan pada sasaran strategis. Sasaran Strategis Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian, Sasaran Strategis Unit Eselon 1, Sasaran Strategis hasil kajian teknokratik serta kesesuaian dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Balai Besar Pulp dan Kertas.



Gambar 3 : Model Perumusan Sasaran Strategis BBPK 2015-2019

Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar adalah sebagai berikut :

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Strategis : Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi

2. Perspektif Proses Internal

Sasaran Strategis : Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standarisasi industri

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik

3. Perspektif Pembelajaran Organisasi

Sasaran Strategis : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Sedangkan Sasaran Strategis hasil kajian oleh tim penyusun renstra BBPK adalah sebagai berikut :

1. Perspektif Keuangan

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan pendanaan litbang dan pendapatan jasa balai dengan struktur anggaran yang makin proporsional

2. Perspektif Pelanggan

Sasaran Strategis 2 : Membangun jejaring, kemitraan, dan atau alih daya untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas layanan jasa balai

Sasaran Strategis 3 : Mengembangkan sistem pelayanan dan strategi pemasaran jasa balai yang efektif dan efisien

3. Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis 4 : Memetakan masalah yang dihadapi IPK untuk mendukung perencanaan kegiatan balai

Sasaran Strategis 5 : Memperbaharui sarana dan prasarana balai sesuai dengan perkembangan industri pulp dan kertas

Sasaran Strategis 6 : Memperluas peran dan ruang lingkup lembaga sertifikasi BBPK sesuai dengan kebutuhan masyarakat industri

Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan kegiatan diseminasi, aplikasi, komersialisasi, dan proteksi hasil litbang

Sasaran Strategis 8 : Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana balai

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Sasaran Strategis 9 : Meningkatkan kegiatan litbang industri pulp dan kertas dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah seperti mengurangi ketergantungan impor, diversifikasi produk, menjamin ketersediaan bahan baku, mengatasi masalah air, energi, dan lingkungan hidup

Sasaran Strategis 10 : Memaksimalkan sumber daya internal maupun eksternal untuk meningkatkan kegiatan litbang pulp, ke rtas, derivat selulosa, dan lingkungan

Sasaran Strategis 11 : Mengupayakan percepatan pembentukan infrastruktur sertifikasi profesi untuk SDM industri pulp dan kertas.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dibatasi oleh tugas pokok dan fungsi BBPK yang diatur pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 42 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPK, sebagai berikut :

1. BBPK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertas.
2. Fungsi Balai Besar Pulp dan Kertas yaitu:
 - penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri;
 - pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;
 - pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan

BBPK, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri pulp dan kertas; dan

- pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.

Dengan memperhatikan sasaran strategis Kementerian Perindustrian dan hasil kajian teknokratik serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Balai, maka disusun Sasaran Strategis BBPK 2015-2019 sebagai berikut :

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi

Sasaran Strategis 1.2 : Meningkatnya permintaan layanan jasa balai

2. Perspektif Proses Internal

Sasaran Strategis 2.1 : Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri

Sasaran Strategis 2.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik

3. Perspektif Pembelajaran Organisasi

Sasaran Strategis 3.1 : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
BBPK 2015-2019

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS 1.1	Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	1. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri	Penelitian	1	1	1	1	1
		2. Hasil litbang prioritas yang dikembangkan	Litbangyasa	3	3	3	3	3
SS 1.2	Meningkatnya permintaan layanan jasa balai	Persen Kenaikan	%	2	2	2	2	2
SS 2.1	Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri	Hasil kajian pengembangan standardisasi	Kajian	1	1	1	1	1
SS 2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik	Indeks Kepuasan Pelanggan	Indeks	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
SS 3.1	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Jumlah Personil Yang Mengikuti Pelatihan	Orang	35	35	35	35	35
		2. Unit peralatan	Unit	2	2	2	2	2

Pada tahun 2018, dokumen renstra ini diriviu dan dikaji ulang sesuai dengan arah kebijakan dari pusat, sehingga terdapat beberapa penyesuaian sasaran strategis. Sasaran Strategis BBPK sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya hasil - hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada industri

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya fasilitas kelembagaan, teknologi, industri hijau sarana dan prasarana dan SDM litbang

Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BBPK

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target	
				2018	2019
1.	Meningkatnya hasil - hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri	Hasil litbang Prioritas yang dikembangkan	Penelitian	3	3
		Hasil litbang yang diimplementasikan	Penelitian	1	1
		Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)	Paket Teknologi/ Litbangyasa	2	2
		Kerjasama litbang instansi dengan industri	Kerjasama	13	13
2	Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global	KTI	17	17
		Prosiding yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global	Prosiding	3	3
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat kepuasan pelanggan	Indeks	3,6	3,6
4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Tingkat maturitas SPIP	Indeks	3,2	3,2
5	Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada industri	Jumlah orang (SDM industri)	Orang	50	50
		Jumlah sampel	Sampel	1500	1500
		Jumlah order	Order	900	900
6	Meningkatnya fasilitas kelembagaan, teknologi, industri hijau, sarana dan prasarana dan SDM litbang	Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat	Orang	40	40
		Jumlah pengadaan alat laboratorium	Alat	6	6
		Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN	Lingkup	1	1

Pada tahun 2019, dokumen renstra ini diriviu dan dikaji ulang sesuai dengan arah kebijakan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, sehingga terdapat beberapa penyesuaian sasaran strategis. Sasaran Strategis BBPK sebagai berikut :

- Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efisiensi industri dalam rangka mendorong daya saing industri
- Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya penguasaan teknologi industri
- Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri
- Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi

Adapun indikator kinerja kegiatan dari masing-masing sasaran strategis adalah sebagaimana disajikan pada tabel Tabel 7. di bawah ini.

Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BBPK Tahun 2019.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Tahun 2019
1	Meningkatnya efisiensi industri dalam rangka mendorong daya saing industri	Peningkatan efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan produk inovasi/paten hasil litbangyasa	10%
2	Meningkatnya penguasaan teknologi industri	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan produk inovasi hasil litbangyasa pada tahun 2019	1 Perusahaan Industri
		Rasio hasil litbangyasa yang diusulkan untuk mendapat paten dibandingkan dengan jumlah litbangyasa yang dihasilkan	10%
		Rasio hasil litbangyasa yang mencapai TRL 6 dibandingkan jumlah litbangyasa yang dilaksanakan pada tahun berjalan	50%
		Rasio paket teknologi/konsultasi yang berhasil memecahkan masalah industri dibandingkan dengan total jumlah permintaan jasa problem solving dari industri pada tahun berjalan	50%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Tahun 2019
3	Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa teknis	Indeks 3,6
		Tingkat ketepatan waktu layanan jasa teknis	95
4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	Indeks 3,7
		Nilai akuntabilitas kinerja	A

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

BBPK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertas. Untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu organisasi, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pulp dan Kertas 2015-2019 :

1. Hasil litbang yang diimplementasikan minimal satu setiap tahun
2. Pengguna layanan jasa balai meningkat minimal 2% setiap tahun

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019 maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

A. Industri Prioritas

Dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 ditentukan 10 industri prioritas yang akan dikembangkan tahun 2015 - 2019. Kesepuluh industri prioritas tersebut dikelompokkan kedalam 6 (enam) industri andalan, 1 (satu) industri pendukung, dan 3 (tiga) industri hulu dengan rincian sebagai berikut :

1. Industri Pangan;
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
4. Industri Alat Transportasi;
5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT);
6. Industri Pembangkit Energi;
7. Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong;
8. Industri Hulu Agro;
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan
10. Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara).

B. Perwilayahan Industri

Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa pembangunan industri dilakukan dengan pendekatan sektoral yang terencana dan pendekatan spasial yang terintegrasi. Pendekatan sektoral yang terencana dilaksanakan melalui rencana pembangunan industri nasional, sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan melalui pengembangan perwilayahan industri. Cakupan pelaksanaan pengembangan perwilayahan industri adalah Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran pengembangan perwilayahan industri adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas luar Jawa dibanding Jawa menjadi 29,36% : 70,64% pada tahun 2019;
 2. Peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan non-migas di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan non migas nasional;
 3. Penumbuhan kawasan industri sebanyak 14 kawasan yang diprioritaskan berada di luar Jawa sampai dengan tahun 2019; dan
1. Pembangunan 22 Sentra IKM baru.

Perwilayahan Industri dilakukan melalui percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Percepatan penyebaran industri dapat dilakukan dengan pembangunan industri di luar Jawa, atau melakukan relokasi industri eksisting di Jawa ke luar Jawa. Sedangkan, pemerataan pembangunan industri dapat diperoleh melalui penyebaran industri

yang berdampak pada peningkatan PDRB sektor industri dan penyerapan tenaga kerja secara berimbang antara Jawa dan luar Jawa, termasuk pada daerah tertinggal. Upaya pemerataan ini erat kaitannya dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri yang akan menjadi penggerak utama (*prime mover*) yang akan membawa kemajuan atau peningkatan bagi daerah sekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, termasuk batas-batasnya.

1. Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Konsep utama WPPI adalah terbentuknya suatu wilayah dengan karakteristik tertentu yang berpotensi untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri tertentu yang akan berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) bagi pengembangan wilayah tersebut serta membawa peningkatan pertumbuhan industri dan ekonomi pada wilayah lain di sekitarnya dalam suatu wilayah regional atau provinsi dengan batas-batas yang jelas. Pemilihan dan penetapan WPPI bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan prioritas pembangunan industri pada suatu wilayah, namun juga menjadi strategi agar percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dapat diwujudkan. Lebih jauh, pengembangan WPPI dimaksudkan untuk menekan kesenjangan (*disparity*) pendapatan dan mengurangi kesenjangan kemiskinan antar wilayah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta kesenjangan antara kota dan desa.

2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Industri penggerak utama untuk setiap WPPI dan industri lainnya haruslah dibangun dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Pengembangan KPI dilakukan dengan mengacu pada RTRW masing-masing kabupaten/kota. KPI adalah tempat berlokasinya kawasan industri dan industri-industri di daerah yang tidak memiliki kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam WPPI dan tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak

secara teknis dan ekonomis, pengembangan industrinya dapat dilakukan sepanjang berada di dalam KPI.

3. Pembangunan Kawasan Industri

Pembangunan kawasan industri akan diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Dalam rangka percepatan penyebaran industri keluar Pulau Jawa, pemerintah membangun kawasan industri sebagai infrastruktur industri di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Pembangunan kawasan industri sebagai perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta.

4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

A. Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi: (a) pembangunan sumber daya manusia; (b) pemanfaatan sumber daya alam; (c) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (e) penyediaan sumber pembiayaan.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

SDM Industri meliputi : (a) wirausaha Industri (pelaku usaha Industri); (b) tenaga kerja Industri (tenaga kerja profesional di bidang Industri); (c) pembina Industri (aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Industri di pusat dan di daerah); dan (d) konsultan Industri (orang atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi, pemecahan masalah bagi Industri).

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

B. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri

Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana industri yang memadai meliputi standarisasi industri, infrastruktur industri (kawasan industri) dan sistem informasi industri.

1. Standardisasi Industri

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

2. Infrastruktur Industri

Pembangunan infrastruktur industri dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif. Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar Kawasan Peruntukan Industri, meliputi energi dan lahan kawasan industri.

3. Sistem Informasi Industri Nasional

Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan untuk:

- 1) Menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan dan akses terhadap data dan/atau informasi;
- 2) Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional yang

meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik, dalam mendukung pembangunan Industri nasional.

C. Pembangunan Industri Hijau

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standarisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau.

Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau (SIH) yang secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilaksanakan oleh auditor industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor industri hijau.

Untuk mendorong percepatan terwujudnya Industri Hijau, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan industri baik fiskal maupun non fiskal. Strategi pengembangan Industri Hijau akan dilakukan yaitu:

- 1) mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau; dan

- 2) membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau.

D. Pengembangan IKM

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,4 juta unit dan merupakan lebih dari 90 persen dari unit usaha industri nasional. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih dari 9,7 juta orang pada tahun 2013 dan merupakan 65,4 persen dari total penyerapan tenaga kerja sektor industri non migas. Disamping itu IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri Kecil dan Industri Menengah ditetapkan oleh Menteri. Dalam rangka meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha Industri Kecil dan Menengah dalam negeri ditetapkan bahwa Industri Kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar Pulp dan Kertas

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran strategis dituangkan ke dalam program kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk mencapai sasaran strategis BBPK, maka disusun program seperti tersaji pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Sasaran dan Program BBPK Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program
1	Meningkatnya efisiensi industri dalam rangka mendorong daya saing industri	Program pengukuran hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri
2	Meningkatnya penguasaan teknologi industri	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri • Program peningkatan hasil litbang prioritas • Program Peningkatan Kerjasama Konsultasi
3	Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik • Program pemenuhan standar pelayanan waktu layanan
4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Program penerapan pengendalian internal • Program peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat dalam memberikan tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah serta kinerjanya.

A. Program pengukuran hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Pelaksanaan program ini dapat dicapai dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas litbang dengan memelihara penerapan sistem manajemen litbang KNAPPP
2. Meningkatkan kerjasama penelitian dengan industri
3. Penerapan dan pengukuran manfaat litbang di industri

B. Program peningkatan hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Pelaksanaan program ini dapat dicapai dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas litbang dengan memelihara penerapan sistem manajemen litbang KNAPPP
2. Pendataan dan mempromosikan hasil litbang BBPK yang telah dilaksanakan

C. Program peningkatan hasil litbang prioritas

Pelaksanaan program ini akan dicapai dengan dilakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan proposal litbang yang baik
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian
3. Peningkatan kemampuan peneliti
4. Penyediaan sarana dan prasarana penelitian

D. Program Peningkatan Kerjasama Konsultasi

Pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Intensifikasi pemasaran layanan jasa ke Industri
2. Membangun jejaring, kemitraan, dan atau alih daya untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas layanan jasa balai

E. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerapan sistem manajemen mutu di lingkungan BBPK
2. Melakukan survey kepuasan pelanggan
3. Meningkatkan kemudahan akses informasi publik
4. Penerapan budaya kerja 5K dan pelayanan satu pintu

F. Program pemenuhan standar pelayanan waktu layanan

Pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerapan sistem manajemen laboratorium di lingkungan BBPK
2. Penguatan sarana dan prasarana di laboratorium

G. Program penerapan pengendalian internal

Pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Penerapan pelaksanaan pengendalian intern SPIP

H. Program peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan

Pelaksanaan program ini dapat dicapai dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan SDM
2. Optimalisasi peran pengawasan pada bidang keuangan

3.3 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 42 Tahun 2006 mengenai Organisasi dan Tata Kerja, BBPK terdiri dari :

A. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan BBPK.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, evaluasi dan laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara;
- c. perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, serta urusan perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan.

B. Bidang Pengembangan Jasa Teknik

Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha; dan
- c. pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

C. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana

dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standar produk industri pulp dan kertas.

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa;
- b. perencanaan, penelitian dan pengembangan industri pulp, kertas dan derivat selulosa; dan
- c. perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

D. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu, serta produk dan limbah industri pulp, kertas dan derivat selulosa, melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa;
- b. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, evaluasi hasil sertifikasi serta penyusunan dan penerbitan laporan hasil sertifikasi dan memelihara sistem sertifikasi;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi.

E. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi, alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan konsultasi kepada masyarakat industri pulp, kertas dan derivat selulosa;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas dan derivat selulosa;
- c. perencanaan dan pelaksanaan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok jabatan fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala BBPK.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target Tahun 2019
1	Meningkatnya efisiensi industri dalam rangka mendorong daya saing industri	Peningkatan efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan produk inovasi/paten hasil litbangyasa	%	10%
2	Meningkatnya penguasaan teknologi industri	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan produk inovasi hasil litbangyasa pada tahun 2019	Perusahaan Industri	1
		Rasio hasil litbangyasa yang diusulkan untuk mendapat paten dibandingkan dengan jumlah litbangyasa yang dihasilkan	%	10
		Rasio hasil litbangyasa yang mencapai TRL 6 dibandingkan jumlah litbangyasa yang dilaksanakan pada tahun berjalan	%	50
		Rasio paket teknologi/konsultasi yang berhasil memecahkan masalah industri dibandingkan dengan total jumlah permintaan jasa problem solving dari industri pada tahun berjalan	%	50
3	Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa teknis	Indeks	3,6
		Tingkat ketepatan waktu layanan jasa teknis	%	95
4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	Indeks	3,7
		Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	A

4.2 Kerangka Pendanaan

No	Program / Kegiatan Untuk Mencapai Sasaran Strategis	Tahun 2019 (Juta Rupiah)
1	Program pengukuran hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri	230
2	Program peningkatan hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industry	230
3	Program peningkatan hasil litbang prioritas	2.447
4	Program Peningkatan Kerjasama Konsultasi	134
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	302
6	Program pemenuhan standar pelayanan waktu layanan	776
7	Program penerapan pengendalian internal	213
8	Program peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan	148

BAB V

PENUTUP

Renstra BBPK disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), rancangan renstra teknokratik serta tugas pokok dan fungsi Balai berisi visi, misi, program, tujuan dan indikator kinerja, sasaran dan indikator sasaran, berisi target tahunan dan indikator kinerja unit (IKU)

Renstra Kementerian Perindustrian merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi pembangunan industri nasional yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan.

Visi pembangunan industri tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun yaitu: 1) Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan; 2) Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi; 3) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan 4) Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam membangun industri yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing.

Visi BBPK adalah menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan.
2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan di BBPK sesuai renstra BBPK 2015-2019 ditentukan tidak hanya oleh internal Balai saja, namun juga ditentukan oleh seluruh *stakeholder* yang meliputi internal Balai, Eselon 1 BPPI, Kebijakan Kementerian Perindustrian, masyarakat industri, akademisi dan masyarakat luas.

LAMPIRAN